

# OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM PENDEKATAN KEAMANAN ABERYSTWYTH/WALES SCHOOL

## PEACEKEEPING OPERATIONS IN ABERYSTWYTH/WALES SCHOOL SECURITY APPROACH

Safri Hidayat<sup>1</sup> dan Rizal Adhitya Hidayat<sup>2</sup>

Pamen Kostrad/Universitas Padjadjaran dan Universitas Al-Azhar Indonesia  
(safrihidayatzeni1995@yahoo.co.id dan rizalhidayat369@yahoo.co.id)

**Abstrak** – Tulisan ini bertujuan untuk memahami operasi pemeliharaan perdamaian melalui pendekatan keamanan kritis (*Critical Security Study*) dalam kajian studi keamanan *Aberystwyth/Wales School*. Pendekatan keamanan dalam pemikiran *Aberystwyth/Wales School* merupakan hasil dari pergeseran fokus keamanan yang menghadirkan manusia sebagai obyek referen keamanan pasca perang dingin. Hal ini kemudian melahirkan konsep emansipasi sebagai konsep keamanan yang meletakkan kehadiran keamanan manusia yang pada hakikatnya membebaskan manusia dari segala jenis ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Emansipasi adalah bentuk keamanan itu sendiri yang membebaskan manusia dari dampak perang baru berupa perang-perang sipil dalam bentuk berbagai macam tekanan, penyiiksaan dan penindasan yang men-dehumanisasi manusia dari eksistensi kehidupannya sehari-hari. Melalui relevansi tujuan dan prinsip operasi pemeliharaan perdamaian dengan konsep emansipasi *Aberystwyth/Wales School*, maka pada intinya operasi pemeliharaan perdamaian merupakan fondasi utama penegakan keamanan manusia dalam menjamin keamanan dan ketertiban bagi perdamaian dunia. Esensi konsep emansipasi bagi penegakan keamanan manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah membawa manusia kembali kepada hakekat penemuan kemanusiaannya, yaitu mampu menjalani kehidupan kemanusiaannya dalam lingkungan keamanan dan perdamaian yang menjamin kebebasannya dari setiap ancaman yang berusaha membatasi eksistensi kehidupan kemanusiaannya secara individu dan sosial.

**Kata kunci:** operasi pemeliharaan perdamaian, *aberystwyth/wales school*, pendekatan keamanan kritis, konsep emansipasi

**Abstract** – *This writing aims to propose the peacekeeping operations through the Critical Security Study in Aberystwyth/Wales School security Approach. It becomes the Security approach as the result from the shifting referent object of security that focused on human security after the cold war. This security approach has essentially been introduced as the concept of emancipation as a security concept that putting human security presence to freeing people from all kind of threats, both military and nonmilitary. The Freeing people of Emancipation Concept means a form of security in*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana (S3) Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Bertugas di Kostrad. Jabatan Pamen Kostrad. Pangkat Letnan Kolonel Czi. Alumni Akademi Militer 1995. Meraih M.Sc dibidang *Defense and Strategic Studies* dari *University of Madras* dan *Defense Services and Staff College (DSSC)*, Wellington, India tahun 2010.

<sup>2</sup> Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana (S3) Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia.

itself that liberating people from the impacts of new wars caused by civil wars in various kinds of pressure, torture and oppression that dehumanizing people from its existence daily life. Through the relevance of the objectives and principles of peacekeeping operations with the concept of emancipation of Aberystwyth/ Wales School, peacekeeping operations is the main foundation of human security enforcement in order to ensure security and peace in the whole world. The essence of the concept of emancipation for the enforcement of human security in this case is to bring human back to the essence of the invention of humanity. It means is able to living in peace and security environment that ensure freedom from every threats of limitation the existence of its humanity lives, both individually and societal.

**Keywords:** peacekeeping operations, critical security study, aberystwyth/wales school, emancipation concept

## Pendahuluan

*Peacekeeping operations* atau operasi pemeliharaan perdamaian saat ini menjadi sebuah kajian fenomenal sejalan dengan pergeseran studi keamanan pasca Perang Dingin, yang terkait dengan kemunculan perang baru yang mengancam eksistensi keamanan manusia.<sup>3</sup> Dikatakan fenomenal dikarenakan perang-perang baru yang mengancam perdamaian saat ini lebih mengarah kepada perang domestik/perang sipil akibat konflik-konflik politik diantara berbagai struktur politik lokal di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, perang domestik mengakibatkan anarki sistem politik sebagai pengendali jalannya pemerintahan sehari-hari di negara yang mengalami konflik politik lokal tersebut.

Lebih dari sekedar anarki sistem politik, konflik politik lokal yang berujung pada kekerasan/perang politik tersebut mengakibatkan kehancuran struktur sosial masyarakat. Struktur social yang selama ini mewadahi berbagai kebutuhan dan keinginan rakyat/bangsa yang bersangkutan akan berbagai kehidupan sosial yang sebelumnya berjalan damai, aman dan tentram.

Perang domestik dalam terminologi pemikiran Kaldor merupakan eksesperang-perang baru (*new wars*).<sup>4</sup> Apa yang dimaksud oleh Kaldor tersebut di atas terkait dengan pergeseran fokus keamanan yang mengarah kepada keamanan manusia sebagai bagian dari keamanan non-tradisional. Pergeseran keamanan tradisional yang melibatkan peran

---

<sup>3</sup> Penulisan berikutnya akan digunakan *Peacekeeping Operations*.

<sup>4</sup> Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organized Crime in A Global Era*, (California: Stanford University Press, 1999).

sentral negara sebagai penyedia utama payung keamanan negara bergeser menjadi keamanan nontradisional yang melibatkan ragam isu nonmiliter dengan aktor non-negara sebagai penggerak utama ragam isu nonmiliter tersebut.

Perang-perang baru (*New Wars*) yang mengusung isu-isu nonmiliter sebenarnya menempatkan dirinya tidak dapat lepas dari perdebatan fokus keamanan nontradisional. Dalam hal ini, Alkire menjelaskan bahwa persoalan keamanan manusia terkait keamanan bagi negara atau bagi manusia itu sendiri (masyarakat, kelompok dan individu).<sup>5</sup> Alkire mengacu kepada pemikiran Paris terkait penjabaran keamanan bagi siapa (*security for whom*) dan sumber ancaman keamanan (*source of the security threat*).<sup>6</sup>

Garis besar acuan pemikiran Paris sebenarnya menempatkan keamanan manusia merupakan obyek ancaman keamanan nonmiliter yang mengacu kepada fungsi manusia sebagai individu, kelompok maupun masyarakat. Sedangkan sumber ancaman keamanan manusia bisa bersifat militer, nonmiliter atau keduanya. Bertolak dari penjabaran Keamanan Paris tersebut, maka keamanan manusia dalam hal ini menjadi konsekuensi logis yang merangkum sintesis unit analisis keamanan, baik yang *state-centrism* (ancaman militer) maupun *nonstate-centrism* (ancaman nonmiliter) terhadap *security for whom*. Kemudian penjabaran sumber ancaman keamanan manusia terealisasikan kedalam ancaman nonmiliter seperti: berbagai ancaman lingkungan dan ekonomi yang mengarah kepada kelangsungan hidup masyarakat, kelompok dan individu. Ancaman lingkungan dan ekonomi bisa merupakan dampak dari perang domestik/perang sipil/perang intra-negara.<sup>7</sup>

Perang-perang baru cenderung berupa perang sipil (perang saudara), daripada perang antar negara. Sekitar 95 persen konflik bersenjata sejak pertengahan 1990-an terjadi di dalam negara, bukan antar negara. Perang saudara telah menjadi umum di dunia bekas koloni (jajahan), dimana kolonialisme sering kali meninggalkan warisan persaingan etnis dan wilayah, keterbelakangan ekonomi dan kekuasaan negara yang lemah; dari sinilah muncul 'negara-negara gagal'. Negara-negara ini lemah, dimana mereka gagal

---

<sup>5</sup> Sabina Alkire, *A Conceptual Framework for Human Security*, (Oxford: University of Oxford, 2003), hlm.31.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>7</sup> Roland Paris, "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?", *International Security*, Vol.26, No.2, 2001, hlm.98.

melewati ujian dasar kekuasaan negara; mereka tidak mampu memelihara ketertiban domestik dan keamanan personal, yang berarti kerusuhan sipil, dan bahkan perang sipil, menjadi rutin.

Meskipun demikian, perang-perang baru sering kali memunculkan ancaman yang lebih luas dan hebat pada penduduk sipil daripada perang-perang antar negara dengan gaya lama. Pembagian sipil/militer yang dilambangkan oleh fakta bahwa perang-perang tradisional dilakukan oleh pasukan-pasukan yang terorganisasi dan berseragam (tentara-tentara nasional) telah berubah dalam berbagai cara. Penggunaan taktik-taktik gerilya dan penekanan pada perlawanan rakyat, atau pemberontakan, telah memunculkan karakter membaur pada peperangan modern. Hal ini karena perang gerilya cenderung melibatkan pertempuran-pertempuran skala kecil yang berkelanjutan, daripada pertempuran-pertempuran skala besar, ide konvensional tentang sebuah medan perang menjadi hampir tidak berguna.

Perang semakin berkembang di tengah masyarakat, menjadi sebuah kecenderungan yang semakin memperdalam kerusakan 'kolateral' yang terkadang disebabkan oleh operasi pemberantasan pemberontakan. Pengaburan tersebut juga terjadi karena penduduk sipil semakin sering menjadi sasaran aksi militer (melalui penggunaan ranjau-ranjau darat, bom bunuh diri, bom mobil dan terorisme secara umum). Tujuannya adalah untuk menciptakan kekacauan ekonomi dan sosial, dan untuk menghancurkan pemecahan dan hasrat berperang dari musuh. Peperangan modern karenanya sering disertai oleh krisis pengungsian dimana ribuan, dan terkadang jutaan penduduk yang terusir mencari keamanan dan tempat berteduh, baik untuk sementara maupun permanen. Pembagian sipil/militer semakin dikaburkan oleh perubahan karakter dari tentara dan pasukan-pasukan keamanan. Tentara-tentara gerilya, misalnya, terdiri dari para tentara tidak tetap dan kelompok bersenjata sukarela, dan pemberontakan sering kali memunculkan karakter pemberontakan rakyat.

Terakhir, perang-perang 'baru' sering kali lebih kejam dan mengerikan daripada perang-perang gaya lama, dimana aturan-aturan yang biasanya membatasi perang-perang konvensional antar negara telah disingkirkan. Praktik-praktik seperti penculikan, penyiksaan, pemerkosaan sistematis dan pembunuhan membabi-butakan yang berasal dari ranjau-ranjau darat, bom mobil dan serangan-serangan bunuh diri telah menjadi ciri yang

lazim dari peperangan modern. Ini terkadang dijelaskan dalam sudut pandang implikasi-implikasi dari politik identitas militan, melalui mana musuh didefinisikan menurut keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok tertentu, bukan menurut peran mereka atau aksi-aksi mereka. Semua orang dari sebuah ras atau kebudayaan tertentu karenanya dapat didefinisikan sebagai ‘musuh’, dimana mereka dipandang secara melekat tidak berharga atau jahat, dan bahwa sasaran-sasaran militer dan sipil sama-sama absah.<sup>8</sup>

Bertolak dari pemikiran awal di atas, maka terkait *peacekeeping operations* terdapat dua ide atau gagasan mendasar sehubungan dengan kemunculan perang-perang baru tersebut. Kedua ide atau gagasan mendasar ini mencakup:

- 1) Perang baru yang mengancam keamanan dan perdamaian tersebut juga menghadirkan relevansi empiris dari perang-perang sipil dari sudut pandang keamanan manusia. Manusia dalam hal ini diletakkan sebagai obyek referen keamanan yang harus dijamin eksistensinya sebagai bagian dari politik keamanan global. Dalam hal ini, pendekatan studi keamanan kritis melalui *Aberystwyth/Wales School* memaknai manusia sebagai *centre of security study* dari tujuan keamanan yang sebenarnya (*the true security purpose*).
- 2) Terdapat empat pertanyaan mendasar terkait relevansi konsep *peacekeeping operations* yang dihadapkan pada pendekatan studi keamanan kritis terhadap keamanan yang nyata itu sendiri. Keempat pertanyaan mendasar yang dimaksud mencakup:<sup>9</sup> (1) *What is security?*, (2) *Whose security are we talking about?*, (3) *What counts as a security issue?* Dan yang terakhir adalah: (4) *How can security be achieved?*

## Metodologi

Fokus metodologi yang digunakan dalam tulisan ini berangkat dari pemikiran Ken Booth dan Richard Wyn Jones mewakili *Aberystwyth/Wales School* terkait pada konsep emansipasi dalam pendekatan studi keamanan kritis (*Critical Security Study*) yang

---

<sup>8</sup> Andrew Heywood, *Politik*, (Terjemahan: Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.733-736.

<sup>9</sup> Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*, (New York: Routledge, 2008), hlm.5.

menekankan ancaman keamanan yang lebih bersifat *non state-centrism* yang fokus pada keamanan manusia.

Disamping itu, desain penelitian bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data lebih kepada teknik kepustakaan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menggali *insight peacekeeping operations* yang dihadirkan melalui pendekatan keamanan *Aberystwyth/Wales School* yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### **Pendekatan Studi Keamanan Kritis: Aberystwyth/Wales School**

Hobden dan Jones menjelaskan bahwa studi keamanan kritis merupakan kombinasi pemikiran Gramsci dan teori kritis yang menekankan pada aspek-aspek perdamaian, dan oleh karena itu disebut juga dengan studi/pemikiran pertahanan alternatif pada awal 1980-an.<sup>10</sup> Singkatnya, banyak pemikiran-pemikiran mengenai studi keamanan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat, yang demikian sebenarnya studi keamanan kritis mempersoalkan dominasi negara sebagai obyek natural analisis keamanan dengan argumentasi bahwa negara adalah bagian dari persoalan keamanan itu sendiri, lebih dari sekedar penyedia keamanan.

Para pendukung studi keamanan kritis menempatkan faktor manusia sebagai inti analisis mereka. Studi keamanan kritis menekankan kajian analisisnya melalui faktor manusia ini dalam rangka membantu dan meletakkan tujuan emansipasi, dimana melalui tujuan emansipasi ini maka keamanan dapat tercapai secara keseluruhan.

Menurut Booth, emansipasi adalah membebaskan manusia (dalam fungsinya sebagai individu maupun kelompok) dari berbagai ancaman yang meliputi tekanan fisik dan ikatan manusia terhadap segala bentuk paksaan/penindasan, yang mana emansipasi menghentikan kedua ancaman tersebut keluar dari yang seharusnya manusia dapat bebas menentukan apa yang ingin dilakukannya.<sup>11</sup> Perang dan ancaman terhadap perang adalah salah satu dari ikatan keterancaman tersebut, bersama-sama dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, penindasan politik dan selanjutnya. Keamanan dan emansipasi adalah dua sisi yang berbeda dari koin yang sama. Emansipasi bukan kekuasaan atau

---

<sup>10</sup> Hobden and Jones, "*Critical Theory*", (New York: Oxford University Press, 2001), hlm.241.

<sup>11</sup> Ken Booth, "*Security and Emancipation*", *Review of International Studies*, Vol.17, No.4, 1991, hlm.313

sesuatu yang bersifat struktur/hirarki yang dihasilkan oleh keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri.

Emansipasi menjadi konsep utama dalam pendekatan keamanan kritis. Dalam hal ini, Booth kembali menekankan pentingnya konsep emansipasi sebagai tujuan utama keamanan melalui pemikirannya yang tertuang dalam bukunya, yaitu *Theory of World Security*.<sup>12</sup> Menurut Booth, emansipasi adalah inti dari teori kritis keamanan dunia. Definisi konseptual dari emansipasi yang dibangun oleh Booth berangkat dari pemahaman bahwa: sebagai wacana politik, emansipasi berusaha membebaskan manusia dari berbagai macam tekanan yang membatasi tindakan dalam kehidupan manusia yang kompatibel dengan kebebasan pilihan-pilihan lainnya.

Seperti konsep-konsep lain dalam politik dunia, konsep emansipasi mengandung empat pengertian utama yang menekankan pada: pertama, arti kebebasan (*the meaning of freedom*); kedua, perbedaan antara emansipasi yang nyata dan palsu (*true and false emancipation*); ketiga, kebutuhan akan kemanusiaan yang ideal (*the invention of humanity needs ideals*); dan keempat, hubungan antara keamanan dan emansipasi (*relationship between security and emancipation*). Dalam hal ini, emansipasi sebagai bentuk dari keamanan itu sendiri merupakan perpaduan dari konsep keamanan dan emansipasi, dua sisi yang berbeda dari satu koin (*two sides of the same coin*) yang dinamakan penemuan kemanusiaan (*the invention of humanity*).

Pemikiran Booth melalui emansipasi sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa studi keamanan masih cenderung didominasi pemikiran mengenai keamanan negara (*state security*) yang masih berputar pada ancaman-ancaman bersifat militer (perang) yang menjadi domain dari analisis kaum (neo) realis. Negara sebagai unit sentral keamanan nasional menjadi penjamin utama keamanan bagi warga negara yang didasarkan pada persepsi ancaman militer (*state centric*). Bukan pada faktor keamanan manusia yang bebas dari segala bentuk ancaman dan penindasan nir-militer.

Hal tersebut di atas tertuang dalam pemikirannya yang lain mengenai *Security and Self: Reflections of a Fallen Realist* (1997).<sup>13</sup> Booth mengingatkan bahwa apa yang paling

---

<sup>12</sup> Ken Booth, "*Theory of World Security*", (New York: Cambridge University Press, 2007).

<sup>13</sup> Ken Booth, "*Security and Self: Reflections of a Fallen Realist*", (London: University of College, 1997), hlm.107.

penting dari kecenderungan perang yang bersifat paksaan (kekerasan) akan menghambat emansipasi itu sendiri. Agar emansipasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam kaitannya dengan mempelajari keamanan adalah tidak hanya fokus berkonsentrasi pada tujuan meminimalisir/mencegah perang saja. Menurunkan kemiskinan, tekanan politik dan lainnya juga merupakan faktor penting dalam hal ini. Selanjutnya, tujuan dari keamanan kritis tidak bermaksud untuk mengurangi arti penting dari studi strategis dan keamanan militer, namun lebih dari perlu menambahkan pentingnya agenda keamanan yang lain, seperti kemiskinan, kebebasan manusia, kesehatan dan pendidikan.

## **Pembahasan**

Jawaban mendasar atas keempat pertanyaan ontologis Williams direlevansikan melalui sudut pandang *Aberystwyth School* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) *What is Security?* Keamanan berarti membebaskan manusia dari berbagai ancaman atas berbagai tekanan, penindasan maupun ikatan fisik yang membatasi kebebasan manusia dalam menjalankan segala pilihan hidupnya.
- b) *Whose security are we talking about?* Ancaman terhadap Keamanan manusia yang membebaskan manusia dari obyek referen keamanan negara/militer dan nirmiliter. Keamanan yang sebenarnya ditentukan oleh faktor persepsi terhadap keamanan dalam memandang dan memahami manusia sebagai subyek maupun obyek keamanan itu sendiri.
- c) *What count as a security issues?* Perang dan ancaman terhadap perang, penindasan politik, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan.
- d) *How can security be achieved?* Keamanan yang sebenarnya dapat tercapai jika terjadi emansipasi keamanan. Emansipasi membebaskan manusia dari dua bentuk ancaman, yaitu berbagai tekanan dan ikatan fisik sebagai bentuk paksaan/penindasan yang termanifestasikan dalam perang dan ancaman terhadap perang, kemiskinan, pendidikan yang rendah, penindasan politik dan sebagainya. Pencapaian keamanan yang sebenarnya membawa kembali kepada konsep emansipasi Booth yang menjelaskan bahwa emansipasi adalah keamanan, dan

keamanan merupakan bagian dari emansipasi itu sendiri. Emansipasi bebas dari struktur/sistem kekuasaan politik keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri.

Kemudian, Keempat jawaban tersebut di atas merealisasikan enam tugas pokok *peacekeeping operations*. Tujuan utama dari penempatan para personel Militer di bawah organ PBB ini mengacu kepada beberapa tugas pokok yaitu:<sup>14</sup>

- a) *Monitor a disputed border* (monitoring wilayah konflik/sengketa).
- b) *Monitor and observe peace processes in post-conflict areas* (monitoring dan mengobservasi proses perdamaian pasca konflik di wilayah yang bersangkutan).
- c) *Provide security across a conflict zone* (menjamin keamanan sepanjang zona/wilayah konflik).
- d) *Protect civilians* (melindungi warga sipil/non kombatan).
- e) *Assist in-country military personnel with training and support* (Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan untuk para anggota militer terkait misi perdamaian dan keamanan).
- f) *Assist ex-combatants in implementing the peace agreements they may have signed* (membantu para eks kombatan dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati).

Serangkaian aktivitas di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi pemeliharaan perdamaian yang memiliki satu tujuan, yakni untuk membatasi, mencegah dan mengatur konflik, khususnya terkait usaha-usaha untuk membangun kembali wilayah yang hancur karena konflik. Aktivitas ini merupakan aktivitas berskala internasional yang biasanya ditandai oleh pengiriman pasukan perdamaian baik melalui inisiatif PBB, organisasi internasional lain ataupun negara dan melibatkan unsur-unsur sipil seperti tenaga kesehatan, insinyur dan arsitek, ahli resolusi konflik dan lain sebagainya. Selain

---

<sup>14</sup> UN Peacekeeping, 2015, "United Nations military personnel are the Blue Helmets on the ground. They are contributed by national armies from across the globe", dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/military/>, diunduh pada 12 Juli 2016.

penjelasan di atas, mantan Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali memahami misi pemeliharaan perdamaian sebagai:<sup>15</sup>

*“The deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well. Peacekeeping is an activity that expands the possibilities for both the prevention of conflict and the making of peace.”*

Keenam tugas terkait penempatan para personel militer di bawah organ PBB di atas mengacu kepada tiga prinsip utamamisi di bawah ini, yaitu:<sup>16</sup>

- a) *Consent of the parties*: Kehadiran misi pemeliharaan perdamaian PBB dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik/bersengketa. Hal ini membutuhkan komitmen penuh dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap proses perdamaian bagi penyelesaian konflik. Mereka menerima misi pemeliharaan perdamaian PBB yang bertugas untuk meniadakan segala macam aktivitas/tindakan oleh pihak-pihak yang bertikai/berkonflik, baik secara politik dan fisik dalam rangka menjalankan mandat PBB. Dalam kaitan tersebut, suatu misi pemeliharaan perdamaian rawan terhadap tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertikai/berkonflik, sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam rangka penguatan misi perlu dilakukan, sekalipun hal ini mengurangi arti penting peran utamanya dari misi memelihara perdamaian. Hal tersebut didasarkan pada suatu kenyataan bahwa kehadiran misi pemeliharaan perdamaian PBB terkadang tidak selalu berdampak kuat atau tidak memberikan jaminan penuh bagi jalannya kesepakatan perdamaian yang sudah ada, terutama bagi pihak-pihak utama yang berkonflik dan jelas memiliki perintah dan wewenang yang lemah. Terkadang kesepakatan bersama yang sudah ada terhadap proses perdamaian seringkali mengalami perubahan *setting* atau keadaan akibat kehadiran kelompok bersenjata yang kurang mampu dikendalikan oleh masing-masing kelompok/pihak yang

---

<sup>15</sup> Institute of International Studies, *Indonesia dan Misi Perdamaian PBB: Tinjauan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm.10-12.

<sup>16</sup> UN Peacekeeping, “Principles of UN Peacekeeping”, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles>, 12 Juli 2016.

bersengketa, atau kehadiran pihak-pihak lain yang merusak kesepakatan perdamaian yang sudah ada.

- b) *Impartiality*: Ketidakberpihakan misi merupakan aspek penting terkait menjaga komitmen dan kerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa, namun hal ini tidak disamakan sebagai netralitas atau katiadaan aktivitas. Pasukan penjaga perdamaian PBB diharuskan tidak berpihak kepada salah satu pihak/kelompok yang bertikai/berkonflik, namun harus tegas dengan tidak bersikap netral dalam melakukan tindakan sesuai mandat PBB terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertikai. Tidak hanya ketidakberpihakan saja, namun juga akan menghukum segala macam pelanggaran. Hal ini berarti misi pemeliharaan perdamaian tidak akan menoleransi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai/berkonflik dan tidak bertanggung jawab atas proses perdamaian yang ada atau tidak sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip internasional yang dijalankan oleh misi pemeliharaan perdamaian. Meskipun tetap harus membentuk dan memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang bertikai/berkonflik, dalam menjalankan suatu misi pemeliharaan perdamaian harus seksama atau berhati-hati terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan ketidakberpihakan. Suatu misi pemeliharaan perdamaian yang dijalankan harus selalu dilakukan secara prinsipil yang mengacu kepada prinsip ketidakberpihakan misi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atau dampak merugikan yang diakibatkan dari tindakan yang kurang cermat/hati-hati terkait prinsip ketidakberpihakan tersebut. Hal ini mengakibatkan kegagalan kredibilitas dan legitimasi suatu misi pemeliharaan perdamaian, dan berakibat pada penarikan diri salah satu pihak yang bertikai/berkonflik dari kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat.
- c) *Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*: misi pemeliharaan perdamaian bukan penyelenggara kekuatan terhadap perlunya penggunaan kekuatan militer yang bersifat memaksa. Penggunaan kekuatan militer diperkenankan pada level taktis, dengan persetujuan dewan keamanan PBB, jika dilakukan dalam rangka pertahanan diri dan mempertahankan mandat PBB.

Dalam kondisi dan situasi tertentu yang berusaha merusak dan mengganggu jalannya proses perdamaian, Dewan Keamanan PBB dapat memberikan mandat kepada pasukan penjaga perdamaian (*robust mandate*) berupa otorisasi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan (*use all necessary means*) dalam menghentikan setiap usaha/tindakan yang berusaha mengganggu jalannya proses politik bagi terciptanya perdamaian, melindungi warga sipil dari segala macam ancaman terkait serangan fisik, dan membantu otoritas pemerintah nasional di negara yang bersangkutan dalam menegakkan tatanan dan aturan hukum yang berlaku.

Baik keenam tugas pokok dan ketiga prinsip utama misi dari setiap personel militer yang terlibat dalam *peacekeeping operations* di atas menegaskan kembali apa yang sudah dijelaskan didalam pemikiran awal Booth mengenai studi keamanan kritis itu sendiri, sebagai hasil pergeseran obyek *referentkeamanan* semenjak pasca Perang Dingin.<sup>17</sup> Melalui konsep emansipasi, *peacekeeping operations* sejatinya adalah membebaskan manusia (dalam fungsinya sebagai individu maupun kelompok) dari berbagai ancaman yang meliputi tekanan fisik dan ikatan manusia terhadap segala bentuk paksaan/penindasan. Dalam hal ini, emansipasi menghentikan kedua ancaman tersebut, sehingga manusia dapat *survive* menentukan kehidupan yang ingin dijalannya. Perang dan ancaman terhadap perang adalah salah satu dari ikatan keterancaman tersebut, bersama-sama dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, penindasan politik dan sebagainya.

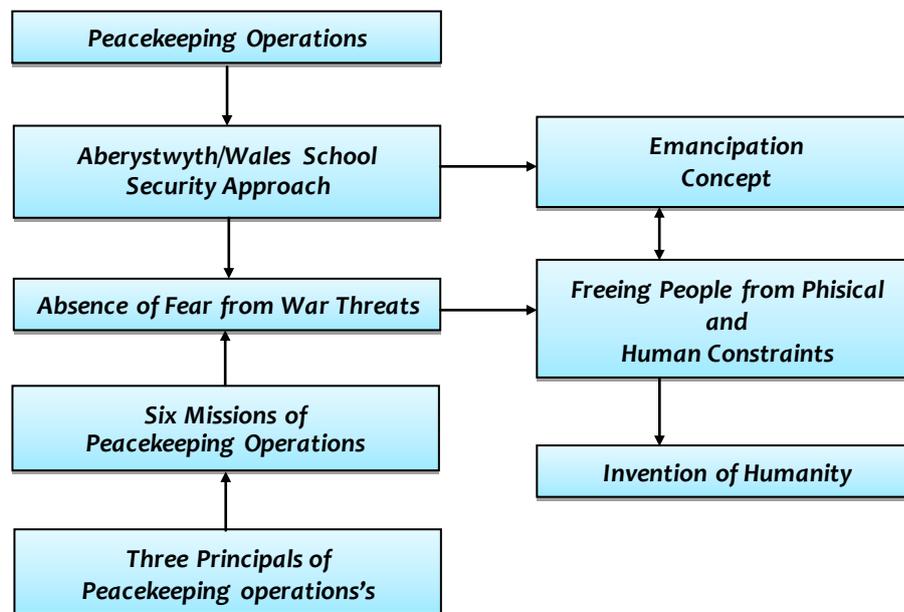
*Peacekeeping operations* pada intinya membebaskan ancaman terhadap keamanan manusia terkait *new wars* seperti perang sipil atau konflik perang sipil dewasa ini. Dikaitkan dengan relevansi keempat kandungan konsep emansipasi Booth, maka emansipasi sebenarnya ditujukan dalam rangka mencapai ketidakhadiran ancaman rasa takut (*absence of fear from warthreats*) akibat perang dan segala bentuk ancaman terhadap keamanan manusia. Keamanan manusia dalam *peacekeeping operations* melalui pemikiran *Aberystwyth/Wales School* berarti membebaskan manusia terhadap berbagai pilihan kehidupannya sebagai jalan keamanan menuju manusia seutuhnya (*invention of humanity*).

---

<sup>17</sup> Ken Booth, *op.cit.*

Secara garis besar, keterkaitan operasi pemeliharaan perdamaian dalam pendekatan keamanan *Aberystwyth/Wales School* di atas dapat diilustrasikan melalui gambar di bawah ini:

**Gambar 1.** Keterkaitan Operasi Pemeliharaan Perdamaian dalam Pendekatan Keamanan *Aberystwyth/Wales School*



Sumber: Hasil Pengembangan Penulis yang diolah dari berbagai literatur

## Kesimpulan

*Peacekeeping operations* pada hakikatnya merupakan operasi keamanan yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan sosial masyarakat akibat terjadinya perang sipil yang bermula dari konflik didalam sistem politik dan berujung pada terjadinya perang saudara di wilayah negara yang bersangkutan.

Beberapa implikasi perang sipil tersebut memunculkan berbagai ancaman seperti kemiskinan, kesehatan, kelaparan, penindasan politik, akses pendidikan/sekolah yang terhambat dan sebagainya. Kesemuanya tersebut menghadirkan sebuah ancaman terhadap eksistensi hidup bagi terjaminnya pemeliharaan keamanan manusia seutuhnya. Ketidakhadiran semua bentuk ancaman tersebut bisa dikatakan sebagai *the absence of fear from war threats*. Dalam rangka tujuan inilah maka kehadiran *peacekeeping operations* diperlukan bagi penegakan perdamaian dan keamanan internasional di

berbagai belahan penjuru dunia yang terlibat konflik atau perang sipil tersebut. Perang sipil atau konflik politik yang berujung pada terjadinya perang sipil tersebut merupakan realisasi manifes dari bentuk perang-perang baru (*new wars*).

Sebagai jalan menuju keempat realisasi konsep emansipasi keamanan menurut pendekatan *Aberystwyth School*, maka *Peacekeeping operations* merupakan jalan penemuan bagi keamanan manusia seutuhnya berupa *inventing of humanity*. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keenam tugas pokok setiap personel militer dalam setiap misi *peacekeeping* berdasarkan tiga prinsip utama *peacekeeping operations*. Relevansinya adalah *invention of humanity* dapat tercapai jika setiap *peacekeeping operations* mampu mewujudkan situasi dan kondisi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Boutros-Boutros Ghali sebagai: “...both the prevention of conflict and the making of peace.”<sup>18</sup>

Perwujudan mencegah terjadinya konflik (perang) dan menciptakan perdamaian pada intinya merasionalisasikan *peacekeeping operations* terhadap keempat pertanyaan ontologis William<sup>19</sup> tentang studi keamanan sebagai refleksi atas konsep emansipasi keamanan *Aberystwyth School*. Emansipasi adalah bentuk keamanan itu sendiri yang membebaskan manusia dari berbagai ancaman struktural kehidupannya atau atas berbagai pilihan hidupnya agar tetap *survive*, baik sebagai individu, kelompok, komunitas, masyarakat dan negara-bangsa.

---

<sup>18</sup> Boutros Boutros-Ghali, “Report of the UN Secretary-General: "Agenda for Peace". Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping”, report written by UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali in 1992, dalam <http://www.cfr.org/peacekeeping/report-un-secretary-general-agenda-peace/p23439>, diunduh pada 12 Juli 2016.

<sup>19</sup> Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*, (New York: Routhledge, 2008), hlm. 5.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alkire, Sabina. 2003 *A Conceptual Framework for Human Security*. Oxford: University of Oxford.
- Booth, Ken. 2007. *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press.
- , *Security and Self: Reflections of a Fallen Realist*. London: University of College.
- Heywood, Andrew. 2004. *Politik*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hobden and Jones. 2001. *Critical Theory*. New York: Oxford University Press.
- Institute of International Studies. 2013. *Indonesia dan Misi Perdamaian PBB: Tinjauan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Kaldor, Mary. 1999. *New and Old Wars: Organized Crime in a Global Era*. California: Stanford University Press.
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routhledge.

### Jurnal

- Booth, Ken. 1991. "Security and Emancipation". *Review of International Studies*, Vo.17. No.4.
- Paris, Roland. 2001. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?". *International Security*. Vol.26. No.2.

### Website

- Boutros Boutros-Ghali, "Report of the UN Secretary-General: "Agenda for Peace". Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping", a report written by UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali in 1992, dalam <http://www.cfr.org/peacekeeping/report-un-secretary-general-agenda-peace/p23439>, diunduh pada 12 Juli 2016.
- UN Peacekeeping. 2015. "United Nations military personnel are the Blue Helmets on the ground. They are contributed by national armies from across the globe", dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/military/>, diunduh pada 12 Juli 2016.
- UN Peacekeeping. "Principles of UN Peacekeeping", dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles>, diunduh pada 12 Juli 2016.

